

INOVASI INKLUSIF GENDER DALAM SOCIOPRENEURSHIP DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EP Ady Hartanto¹, Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si.²

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email: epadyh.rasyid@gmail.com , triyuniningsih26@gmail.com

*corresponding author

Abstract

This study analyzes gender-inclusive innovation within sociopreneurship in the Indonesian National Police (Polri) as an effort to build a modern, humanistic, and gender-responsive law enforcement institution. Using a descriptive qualitative method through literature review and analysis of gender policies in Polri, the study explains the relevance of sociopreneurship as a strategic approach to empowering women police officers (Polwan) and personnel with disabilities. The findings show that gender mainstreaming policies, Polwan participation, and community-based empowerment programs contribute significantly to strengthening social justice and public trust. However, structural barriers, patriarchal culture, and limited leadership access remain major challenges. This study concludes that strategic innovation, capacity building, and multi-stakeholder collaboration are essential to developing sustainable gender-responsive sociopreneurship models in Polri.

Kata kunci: Gender Inclusive Innovation , Sociopreneurship, Indonesia National Police

Abstrak

Penelitian ini menganalisis inovasi inklusif gender dalam sociopreneurship di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai upaya membangun institusi kepolisian yang modern, humanis, dan responsif gender. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis kebijakan gender di Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender, peran Polwan, dan program pemberdayaan berbasis komunitas berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keadilan sosial dan kepercayaan publik. Namun demikian, hambatan struktural, budaya patriarki, serta keterbatasan akses kepemimpinan masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi strategis, penguatan kapasitas, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan untuk mengembangkan model sociopreneurship responsif gender yang berkelanjutan di Polri.

Kata kunci: Inovasi Inklusif Gender, Kewirausahaan Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi strategis yang memegang peranan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan global terhadap profesionalisme, transparansi, dan humanisme menjadikan Polri tidak hanya berfokus pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Salah satu isu yang semakin mengemuka adalah inklusi gender, yang menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan, akses, partisipasi, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (Siregar et al., 2023).

Dalam era modern inklusivitas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menempati posisi penting dalam berbagai organisasi publik termasuk dalam kepolisian. Dalam penerapan

inklusi gender dalam Polri bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah personel perempuan (Polwan) atau memberikan akses kepada penyandang disabilitas, melainkan juga menciptakan ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara optimal. Dalam konteks ini, sociopreneurship yakni kewirausahaan sosial yang mengedepankan kebermanfaatan bagi masyarakat dapat menjadi strategi inovatif untuk mengintegrasikan nilai keadilan gender dalam kinerja Polri (Chatterjee et al., 2021).

Di dalam tubuh Polri, keberadaan Polisi Wanita (Polwan) dan personel penyandang disabilitas merupakan aset yang perlu diberdayakan secara optimal. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa dominasi budaya patriarki, stereotip peran gender, keterbatasan akses pada jenjang kepemimpinan, serta minimnya program penguatan kapasitas yang berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan. Hal ini berimplikasi pada belum maksimalnya kontribusi Polwan dan anggota disabilitas dalam berbagai lini tugas kepolisian (Dewi, 2023).

Dalam konteks inilah, konsep sociopreneurship menjadi relevan sebagai pendekatan inovatif. Sociopreneurship adalah kewirausahaan sosial yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada dampak sosial, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Jika diintegrasikan ke dalam kebijakan Polri, sociopreneurship dapat menjadi wadah untuk memberdayakan Polwan dan anggota disabilitas agar lebih mandiri, kreatif, dan berdaya saing, mengembangkan program-program berbasis sosial-ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, anak-anak, serta komunitas marjinal, meningkatkan citra Polri sebagai organisasi yang modern, humanis, dan responsif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (Rosca et al., 2020).

Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sementara di tingkat global, penerapan inovasi inklusif gender sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima (Kesetaraan Gender) dan tujuan kedelapan (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif) (Nurdin, 2024).

Sejumlah inisiatif yang telah dilakukan Polri menunjukkan arah positif, seperti program rekrutmen proaktif bagi penyandang disabilitas, pelatihan gender di JCLEC Semarang, serta HeForShe Awards yang mendorong kepemimpinan perempuan. Namun, langkah-langkah tersebut masih perlu diperkuat melalui sebuah roadmap strategis yang lebih terstruktur, agar inovasi inklusif gender dapat diimplementasikan secara konsisten, berkesinambungan, dan terukur dalam kerangka sociopreneurship.

Dengan demikian, pembahasan mengenai Inovasi Inklusif Gender dalam Sociopreneurship di Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi penting, tidak hanya untuk memperkuat peran Polwan dan personel disabilitas di internal Polri, tetapi juga untuk memperluas kontribusi institusi kepolisian dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Masyarakat. Sehingga menjadikan Polri sebagai pedoman dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang tidak hanya kuat secara structural tetapi juga responsive terhadap kebutuhan seluruh lapisan Masyarakat (Sanders et al., 2022).

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut,

1. Menganalisis urgensi penerapan inovasi inklusif gender dalam sociopreneurship di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Mengidentifikasi bentuk program dan inovasi sociopreneurship yang dapat diintegrasikan dalam sistem kerja Polri.
3. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi inklusi gender berbasis sociopreneurship.
4. Merumuskan roadmap strategi pengembangan Polri yang inklusif gender dan berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi.
5. Menganalisis serta menguraikan teori dasar gender dan sociopreneurship serta konsepnya.
6. Memetakan inovasi dan kebijakan Polri dalam rangka inklusi gender dan sociopreneurship

7. Melakukan analisis hambatan dan peluang dan memberikan rekomendasi strategis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam konsep, praktik, serta strategi inovasi inklusif gender dalam sociopreneurship di Polri. Pendekatan Penelitian, Studi Literatur: mengkaji regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi Polri, serta kebijakan nasional dan internasional terkait inklusi gender dan sociopreneurship, Studi Kasus: meninjau praktik nyata Polri, seperti rekrutmen inklusif, program HeForShe Awards, pelatihan gender di JCLEC, dan inovasi berbasis UMKM.

Sumber Data, data primer: wawancara atau diskusi dengan personel Polri, khususnya Polwan dan penyandang disabilitas. Data sekunder: dokumen resmi Polri, peraturan perundangan, artikel ilmiah, laporan media, serta publikasi dari organisasi internasional (UN Women, SDGs).

Teknik Pengumpulan Data. studi dokumentasi: mengumpulkan dokumen regulasi, laporan, dan artikel, Observasi tidak langsung: melalui analisis laporan media dan publikasi resmi Polri. Wawancara mendalam (opsional, jika penelitian lapangan dilakukan). Teknik Analisis Data menggunakan analisis tematik, yaitu Reduksi data: memilah informasi relevan, kategorisasi: mengelompokkan data dalam tema (urgensi, bentuk inovasi, faktor penghambat/pendukung, roadmap), penyusunan narasi deskriptif untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil dan Pembahasan

Inovasi gender dalam sociopreneurship di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat citra institusi dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, implementasinya tidak lepas dari sejumlah hambatan yang bersifat struktural, kultural, maupun praktis. Pertama, hambatan struktural berkaitan dengan dominasi budaya maskulin di tubuh kepolisian. Polri masih merepresentasikan organisasi dengan hierarki ketat dan bias gender, di mana laki-laki mendominasi jabatan strategis dan ruang pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan Polwan sering kali diposisikan hanya pada peran administratif atau pelayanan tertentu, bukan sebagai aktor utama dalam inovasi sosial. Kondisi ini membatasi ruang gerak Polwan untuk berinovasi dalam sociopreneurship yang membutuhkan kepemimpinan visioner dan fleksibel (Hilmiana & Alviani, 2023).

Kedua, terdapat hambatan kultural dan sosial yang bersumber dari stereotip gender. Di masyarakat maupun internal kepolisian, perempuan masih sering dianggap kurang layak memegang peran kepemimpinan atau tugas lapangan yang menuntut keberanian fisik. Polwan sering dihadapkan pada ekspektasi ganda: di satu sisi mereka dituntut profesional, di sisi lain tetap memegang peran domestik sebagai ibu dan istri. Kondisi ini memperberat kapasitas mereka untuk berfokus pada inovasi, terutama dalam bidang sociopreneurship yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan intensif dengan komunitas.

Ketiga, hambatan sumber daya juga menjadi kendala signifikan. Program-program sociopreneurship berbasis gender sering kali hanya bersifat sporadis, berbasis proyek, dan belum terintegrasi ke dalam kebijakan institusi. Keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan pelatihan kewirausahaan sosial, serta minimnya akses jaringan usaha membuat Polwan sulit mengembangkan proyek secara berkelanjutan. Tanpa dukungan sistemik, inovasi gender rawan berhenti di level gagasan atau sekadar seremonial.

Keempat, terdapat hambatan regulasi dan kebijakan. Meskipun Polri telah menerapkan kebijakan *Pengarusutamaan Gender (PUG)*, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Beberapa program masih berjalan secara top-down tanpa partisipasi penuh dari Polwan sebagai subjek utama. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan praktik nyata.

Kelima, hambatan psikologis dan motivasional juga mempengaruhi. Sebagian Polwan merasa kurang percaya diri untuk mengembangkan ide inovatif karena lingkungan kerja yang kompetitif dan

bias gender. Minimnya role model Polwan di posisi strategis juga mengurangi motivasi generasi muda untuk berani tampil dalam inovasi sociopreneurship.

Dari analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan inovasi gender dalam sociopreneurship kepolisian bersifat multidimensional. Hambatan struktural, kultural, sumber daya, regulatif, hingga psikologis saling terkait dan memperlambat lahirnya terobosan. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan adalah pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah Polwan, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi, penguatan kapasitas, serta integrasi program sociopreneurship ke dalam agenda resmi Polri.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, inovasi gender dalam sociopreneurship di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peluang dan potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh dinamika sosial, kebijakan nasional, serta perkembangan global yang mendorong pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, dukungan regulasi nasional dan internasional membuka ruang luas bagi penguatan peran Polwan. Indonesia telah berkomitmen pada agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan nomor 5 (Kesetaraan Gender) dan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Selain itu, Polri juga telah menerapkan *Pengarusutamaan Gender (PUG)* dalam kebijakannya. Kehadiran regulasi ini merupakan peluang strategis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program-program sociopreneurship kepolisian, baik dalam konteks pelayanan publik maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hyunanda et al., 2021).

Kedua, modal sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap Polwan menjadi potensi penting. Penelitian dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa Polwan lebih mudah diterima masyarakat dalam konteks pelayanan, khususnya oleh perempuan dan anak. Polwan kerap dipersepsikan lebih humanis, komunikatif, dan empatik. Karakter ini sangat mendukung pengembangan program sociopreneurship yang membutuhkan kedekatan dengan komunitas, kolaborasi lintas aktor, serta sensitivitas sosial yang tinggi.

Ketiga, perkembangan teknologi digital menjadi peluang besar dalam mendukung sociopreneurship inklusif gender di kepolisian. Pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, dan aplikasi layanan publik dapat menjadi sarana bagi Polwan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Misalnya, mendampingi perempuan korban kekerasan untuk memasarkan produk secara daring, atau melatih komunitas perempuan muda agar memiliki keterampilan digital entrepreneurship yang aman dan berdaya saing.

Keempat, potensi kolaborasi lintas sektor sangat terbuka. Polwan dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun lembaga internasional untuk membangun program-program sociopreneurship. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga memperkuat sumber daya finansial, pengetahuan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk inovasi.

Kelima, potensi internal Polwan sebagai agen perubahan juga sangat besar. Jumlah Polwan di Indonesia terus meningkat, meskipun masih minoritas dibandingkan Polki. Polwan memiliki kompetensi ganda, yaitu kemampuan profesional kepolisian dan sensitivitas gender yang lebih tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kepemimpinan baru dalam kepolisian yang inklusif, humanis, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Dampak sosial inovasi gender dalam sociopreneurship kepolisian memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Pertama, kehadiran Polwan dalam program pemberdayaan masyarakat meningkatkan aksesibilitas layanan kepolisian bagi perempuan dan kelompok rentan. Korban kekerasan, misalnya, lebih berani melapor karena merasa aman berinteraksi dengan Polwan. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang melayani seluruh warga tanpa diskriminasi.

Kedua, program sociopreneurship berbasis gender berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, atau program wirausaha digital, Polwan tidak hanya menjalankan fungsi keamanan tetapi juga berperan

sebagai agen perubahan sosial. Dampak ini menciptakan peningkatan kesejahteraan keluarga, menekan angka ketergantungan ekonomi, dan memperkuat solidaritas komunitas.

Dampak dari perspektif kultural, inovasi gender dalam kepolisian mampu mendorong pergeseran norma dan stereotip gender. Polwan yang terlibat aktif dalam kepemimpinan, pelayanan publik, dan sociopreneurship menantang pandangan tradisional bahwa kepolisian adalah profesi maskulin. Kehadiran Polwan di ruang publik memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas setara dalam menjalankan tugas profesional sekaligus menghadirkan perspektif humanis yang sering kali kurang diperhatikan. Selain itu, keberhasilan Polwan dalam inovasi gender turut memengaruhi budaya masyarakat yang patriarkis. Dengan melihat perempuan polisi berperan aktif dalam keamanan sekaligus pemberdayaan sosial-ekonomi, masyarakat memperoleh teladan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, pelindung, dan penggerak perubahan. Hal ini memperkuat gerakan kesetaraan gender di tingkat lokal maupun nasional (Angehrn et al., 2021).

Dalam perspektif organisasi, inovasi gender membawa dampak positif terhadap transformasi internal Polri. Pertama, meningkatnya partisipasi Polwan dalam program strategis memperkaya keragaman perspektif di tubuh Polri. Hal ini menghasilkan pendekatan pelayanan yang lebih holistik, humanis, dan inklusif. Kedua, inovasi gender mendorong terjadinya modernisasi kepemimpinan di Polri. Polwan yang diberi ruang untuk berperan dalam inovasi dan sociopreneurship menunjukkan gaya kepemimpinan kolaboratif yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berbeda dari gaya kepemimpinan tradisional yang cenderung hierarkis dan otoriter. Ketiga, dari aspek kelembagaan, pengarusutamaan gender menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan legitimasi Polri. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan pelayanan, Polri semakin diakui sebagai institusi yang responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan internasional terhadap kepolisian Indonesia (Goormans et al., 2025).

Strategi Penguatan Inovasi Gender dalam Kebijakan Polri : Penguatan Kebijakan, Kapasitas, dan Program Sociopreneurship

Dalam rangka memperkuat inovasi gender di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejumlah langkah regulatif internal telah mulai ditempuh. Polri telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai struktur internal yang bertugas menyusun regulasi, SOP, dan panduan kerja terkait penugasan, promosi, rekrutmen, serta pelayanan operasional yang responsif gender. Salah satu regulasi kunci yang menguatkan hal ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2022 mengenai PUG, yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan internal yang berorientasi pada kesetaraan gender.

Monitoring dan evaluasi implementasi PUG juga mulai dijalankan secara lebih sistematis, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Contohnya di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, Jawa Timur, dilakukan pemetaan pelaksanaan PUG berdasarkan prasyarat-prasyarat seperti komitmen, kelembagaan, sumber daya, data terpilah gender, dan partisipasi masyarakat. Pada level nasional, telah tersedia pedoman *Monitoring & Evaluasi* kegiatan responsif gender yang mencakup indikator kuantitatif maupun kualitatif untuk mengukur efektivitas implementasi serta mengidentifikasi hambatan yang muncul.

Selain itu, Polri telah mengidentifikasi target dan kuota sebagai instrumen afirmatif untuk mempercepat keseimbangan gender. Salah satu target yang diusulkan adalah peningkatan jumlah Polwan hingga mencapai sekitar 30% dari total personel Polri. Meskipun target ini dianggap ambisius dan membutuhkan waktu panjang, langkah tersebut menunjukkan komitmen Polri terhadap pentingnya representasi Polwan sebagai indikator kesetaraan. Pada aspek karier, promosi jabatan juga telah menjadi bagian dari implementasi, di mana sejumlah Polwan mendapat posisi strategis seperti Kapolres melalui mekanisme mutasi dan rotasi jabatan.

Namun, inovasi gender dalam sociopreneurship dan pelayanan kepolisian memerlukan dukungan kebijakan yang kuat agar dapat terimplementasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu,

diperlukan strategi penguatan yang sistematis, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, serta budaya organisasi.

Rekomendasi Strategis Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Polri perlu menyusun dan memperbarui kebijakan internal terkait PUG agar lebih operasional dan terukur. Perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam setiap program, mulai dari pelayanan publik, pendidikan kepolisian, hingga penugasan internasional. Mekanisme *monitoring & evaluasi* berbasis gender juga perlu dipastikan berjalan konsisten. Peningkatan Kapasitas Polwan Polwan membutuhkan pelatihan berkelanjutan di bidang kepemimpinan, sociopreneurship, dan literasi digital. Program *mentoring* dan peran *role model* bagi Polwan muda penting untuk menumbuhkan motivasi. Selain itu, akses pendidikan lanjutan, baik nasional maupun internasional, harus lebih terbuka bagi Polwan. Reformasi Budaya Organisasi Polri perlu mendorong perubahan paradigma internal agar lebih inklusif. Kampanye internal untuk menghapus stigma dan stereotip gender penting dilakukan, sekaligus memperkuat nilai kepemimpinan kolaboratif dan humanis yang sejalan dengan peran Polwan sebagai agen perubahan sosial. Pengembangan Program Sociopreneurship Inklusif Gender Polwan dapat menjadi fasilitator dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan UMKM, wirausaha digital, dan koperasi komunitas. Pengembangan inkubator bisnis sosial berbasis komunitas juga bisa difokuskan pada perempuan korban kekerasan, anak muda, dan kelompok rentan, sekaligus mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam program *Community Policing*. Kolaborasi Lintas Sektor Keberhasilan inovasi gender membutuhkan kolaborasi dengan kementerian terkait (Kemen PPPA, Kemenkop UKM, Kemendikbudristek), lembaga internasional (UN Women, UNDP), akademisi, LSM, sektor swasta, serta komunitas lokal. Selain itu, skema pendanaan alternatif seperti CSR, hibah internasional, dan dana pemerintah perlu dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan program. Peningkatan Representasi Polwan dalam Kepemimpinan Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan Polwan di posisi strategis harus ditegaskan. Kehadiran Polwan dalam forum pengambilan keputusan, tim khusus, maupun penyusunan kebijakan menjadi indikator penting bagi kinerja institusi Polri yang responsif gender.

Model Sociopreneurship Gender-Responsive untuk Kepolisian

Implementasi Inovasi Inklusif Gender dalam *Sociopreneurship* di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat diwujudkan melalui tiga pilar strategis yang saling menguatkan. Model pelibatan komunitas menjadi landasan awal, di mana Polri bertindak sebagai fasilitator dan pendukung bagi usaha sosial lokal yang dipimpin perempuan atau kelompok rentan. Usaha-usaha ini tidak hanya menerima dukungan finansial atau logistik, tetapi secara substansial diangkat sebagai mitra strategis Polri dalam program pencegahan kekerasan, peningkatan keamanan komunitas, dan advokasi sosial. Kemitraan ini memastikan solusi keamanan bersifat akar rumput dan peka gender.

Selanjutnya, inisiatif ini diperkuat dari internal melalui pembentukan Inkubator Internal. Program ini berfokus pada pelatihan *sociopreneurship* khusus bagi anggota Polri, terutama Polwan, agar mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan menginisiasi, merancang, serta mengimplementasikan program sosial yang berkelanjutan di unit lokal masing-masing. Polwan didorong menjadi agen perubahan yang dapat memadukan tugas kepolisian dengan semangat kewirausahaan sosial.

Terakhir, keberlanjutan dan skala dampak program ini dijamin melalui Kolaborasi Multi-Stakeholder. Polri secara proaktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, dan donor internasional, untuk mendapatkan pendanaan, keahlian, dan dukungan implementasi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa program inovatif gender yang dijalankan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dan berkesinambungan.

Implikasi Untuk Pelatihan, Rekrutmen, Penugasan, dan Kepemimpinan

Dalam upaya memperkuat peran Polri sebagai institusi modern, humanis, dan inklusif gender, diperlukan pengembangan model sociopreneurship yang responsif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan. Model ini diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dengan peran sosial-ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Polri tidak hanya hadir sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial.

Model pertama adalah Community-Based Sociopreneurship, yang menempatkan Polwan sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Implementasi model ini meliputi pendampingan kelompok perempuan di tingkat desa atau kelurahan, pembentukan koperasi usaha, pelatihan UMKM, serta pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk lokal. Kehadiran model ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dan bersinergi dengan masyarakat.

Model kedua adalah Victim-Support Sociopreneurship, yang mengintegrasikan layanan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan program pemberdayaan ekonomi. Korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, maupun kekerasan seksual diberikan akses pada pelatihan kewirausahaan sehingga mereka mampu mandiri secara finansial. Dengan pendekatan ini, Polri berperan ganda, yaitu melindungi korban melalui penegakan hukum serta membantu mereka mengatasi kerentanan ekonomi yang sering kali menjadi faktor berulangnya kekerasan.

Model ketiga adalah Digital Sociopreneurship Polwan, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemberdayaan. Melalui program pelatihan e-commerce, literasi digital, keamanan online, dan pemasaran media sosial, Polwan dapat membuka akses ekonomi yang lebih inklusif bagi perempuan muda maupun komunitas rentan. Selain membuka peluang ekonomi baru, model ini sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko kejahatan siber yang marak menargetkan perempuan.

Selanjutnya, Bhayangkari & Family-Based Sociopreneurship menjadi model keempat. Dalam model ini, Bhayangkari dan keluarga Polwan dilibatkan dalam kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan, seperti pengembangan usaha kreatif, penyelenggaraan bazar, serta pemasaran produk keluarga besar Polri melalui platform kolektif. Implementasi model ini berfungsi ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan internal anggota Polri sekaligus memperkuat solidaritas sosial-ekonomi berbasis keluarga.

Model kelima adalah International Collaboration Sociopreneurship, yang memanfaatkan partisipasi Polwan dalam misi perdamaian dunia sebagai ruang inovasi. Melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti UN Women dan UNDP, Polri dapat mengembangkan program pelatihan kewirausahaan sosial di wilayah pascakonflik maupun daerah rawan. Model ini memperkuat citra Polwan Indonesia sebagai duta perdamaian global sekaligus agen pemberdayaan perempuan lintas negara.

Kelima model tersebut dapat dipadukan dalam Polwan Sociopreneurship Framework yang terdiri atas lima pendekatan: (1) berbasis komunitas untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat; (2) berbasis korban untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan rentan; (3) berbasis digital untuk memastikan akses yang setara dalam ekonomi berbasis teknologi; (4) berbasis keluarga Polri untuk meningkatkan kesejahteraan internal; dan (5) berbasis global untuk memperluas kiprah Polwan di kancah internasional.

Agar kerangka ini dapat diimplementasikan secara efektif, dibutuhkan dukungan strategis melalui tiga langkah utama. Pertama, model pelibatan komunitas, yaitu mendukung usaha sosial lokal yang dipimpin perempuan sebagai mitra Polri dalam program pencegahan kekerasan, keamanan komunitas, dan advokasi. Kedua, inkubator internal, berupa pelatihan sociopreneurship bagi anggota Polri, khususnya Polwan, untuk menginisiasi program sosial di unit kerja masing-masing. Ketiga, kolaborasi multi-stakeholder dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat

sipil, sektor swasta, serta donor internasional untuk mendanai dan mengimplementasikan program inovatif berbasis gender. Dengan penerapan model-model tersebut, Polri dapat memosisikan diri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai institusi sosial transformatif yang berperan aktif dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Inovasi inklusif gender dalam sociopreneurship di Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan upaya strategis untuk mewujudkan Polri yang modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan rentan. Melalui pendekatan gender mainstreaming, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kajian teoritis menunjukkan bahwa penerapan perspektif gender dalam sociopreneurship memperkuat fungsi kepolisian dalam membangun keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran Polwan menjadi kunci penting dalam mendorong inovasi, meskipun masih menghadapi tantangan berupa stereotip gender, keterbatasan akses kepemimpinan, serta hambatan struktural organisasi.

Berbagai peluang dapat dimanfaatkan, seperti program community-based sociopreneurship, victim-support sociopreneurship, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan organisasi internasional. Praktik baik dan studi kasus menunjukkan bahwa kehadiran Polwan mampu menciptakan pendekatan kepolisian yang lebih humanis, inklusif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Analisis hambatan, peluang, serta implikasi terhadap pelatihan, rekrutmen, penugasan, dan kepemimpinan menegaskan bahwa inovasi gender di Polri membutuhkan strategi sistematis dan berkesinambungan. Dengan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta penciptaan model sociopreneurship yang responsif gender, Polri dapat tampil sebagai institusi yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan bangsa.

Saran Bagi Polri mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi Masyarakat, memperluas kesempatan Polwan untuk menempati jabatan strategis dan non-tradisional, serta memastikan proses rekrutmen dan promosi bebas dari bias gender mengembangkan pusat pelatihan dan riset khusus terkait inovasi gender dan sociopreneurship untuk memperkuat kapasitas internal organisasi.

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan menyusun regulasi yang lebih jelas dan terukur mengenai pengarusutamaan gender di sektor kepolisian, termasuk evaluasi implementasi kebijakan yang sudah berjalan, memberikan dukungan anggaran dan program lintas kementerian untuk mendukung inovasi gender di kepolisian, sejalan dengan agenda SDGs.

Bagi Masyarakat mendukung partisipasi aktif dalam program sociopreneurship berbasis komunitas yang diinisiasi Polri, khususnya melalui kolaborasi UMKM, koperasi, dan kelompok perempuan, membentuk jejaring masyarakat sipil yang dapat menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif dalam memastikan keberlanjutan inovasi gender di kepolisian.

Bagi Akademisi dan Peneliti melakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas program gender-responsive sociopreneurship di Polri, baik dari sisi dampak sosial, budaya, maupun ekonomi, mengembangkan model-model baru berbasis evidence-based policy untuk memperkaya praktik inklusif gender di lembaga penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Angehrn, A., Fletcher, A. J., & Carleton, R. N. (2021). "Suck It Up, Buttercup": Understanding and Overcoming Gender Disparities in Policing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 7627. <https://doi.org/10.3390/ijerph18147627>
- Chatterjee, I., Cornelissen, J., & Wincent, J. (2021). Social entrepreneurship and values work: The role of practices in shaping values and negotiating change. *Journal of Business Venturing*, 36(1), 106064. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106064>
- Dewi, Y. P. (2023). Legal Mobilisation by Women with Disabilities in Indonesia. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 24(1), 1–21. <https://doi.org/10.1163/15718158-24010001>
- Goormans, I., Blokland, A., Steenbeek, W., & Vandeviver, C. (2025). How assaults against police officers unfold: identifying incident scenarios using latent class and latent transition analysis. *Policing: An International Journal*, 1–18. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-04-2025-0066>
- Hilmiana, H., & Alviani, D. (2023). Can Woman Leaders Shatter the Glass Ceiling? A Systematic Literature Review. *Journal of Human, Earth, and Future*, 4(4), 501–510. <https://doi.org/10.28991/HEF-2023-04-04-09>
- Hyunanda, V. F., Palacios Ramírez, J., López-Martínez, G., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). State Ibuism and Women's Empowerment in Indonesia: Governmentality and Political Subjectification of Chinese Benteng Women. *Sustainability*, 13(6), 3559. <https://doi.org/10.3390/su13063559>
- Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948–958. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2650>
- Rosca, E., Agarwal, N., & Brem, A. (2020). Women entrepreneurs as agents of change: A comparative analysis of social entrepreneurship processes in emerging markets. *Technological Forecasting and Social Change*, 157, 120067. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120067>
- Sanders, C. B., Gouweloos, J., & Langan, D. (2022). Gender, Police Culture, and Structured Ambivalence: Navigating 'Fit' with the Brotherhood, Boys' Club, and Sisterhood.' *Feminist Criminology*, 17(5), 641–660. <https://doi.org/10.1177/15570851221098040>
- Siregar, Y. S., Nurdin, N., & Rivai, F. H. (2023). AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN THE PLACEMENT OF FEMALE POLICE OFFICERS AS COMPETENCY-BASED SECTOR POLICE CHIEFS IN THE METRO JAYA POLICE. *Dia*, 21(01), 398–409. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.8103>